Agar Akreditasi Menjamin Kualitas

MUHAMMAD SAYUTI

Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Anggota BAN S/M 2018-2023

ernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim seperti dikutip untuk judul tulisan ini, telah viral dan dibaca luas oleh masyarakat. Apakah benar demikian adanya? Lalu bagaimana arah akreditasi sekolah/madrasah ke depan?

Sebagai salah satu anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) 2018-2023, penulis bisa mengatakan, ke depan pernyataan seperti yang disampaikan mendikbud seharusnya tidak boleh lagi

BAN S/M kini sedang melakukan reformasi fundamental perangkat akreditasi yang kami sebut sebagai Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020.

Artinya, sebelum mendikbud mengeluarkan pernyataan di atas, BAN S/M sudah menyadari, memikirkan, dan bertindak untuk mengubah keadaan. Perubahan di bidang pendidikan tidak secepat bisnis daring, semua tentu mafhum.

Kompleksitas masalah, rumitnya regulasi, dan perubahan alam pikiran lama ke baru tak semudah install atau uninstall aplikasi. Perangkat akreditasi versi 2017 atau sebelumnya, banyak dikeluhkan karena kaku berpegang pada regulasi, terlalu administratif, dan bertele-tele.

Seperti menanyakan, apakah sekolah/madrasah memiliki jam dinding dan tempat parkir, sementara semua peserta didik dan guru di sekolah tersebut berangkat dengan jalan kaki. Jumlah pertanyaan juga luar biasa banyak.

Sebagai contoh, perangkat akreditasi tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah 119 pertanyaan, sekolah menengah pertama/tsanawiyah 124, sekolah menengah atas/aliyah 129 dan sekolah menengah kejuruan 133 pertanyaan dan 10 pertanyaan suplemen.

Kajian internal yang melibatkan data secara nasional membuktikan, nilai akreditasi ternyata kecil korelasinya dengan nilai ujian nasional (UN). Dalam hal kaitan antara akreditasi dan nilai UN tersebut, pernyataan mendikbud benar adanya.

Dua fakta di atas tentu meresahkan yang pada gilirannya mendorong BAN S/M untuk segera kembali ke jalan yang benar. Riset Heywood (2007) menyimpulkan, sistem akreditasi yang dikembangkan berdasarkan pemenuhan atas tuntutan regulasi tidak mendorong perbaikan signifikan pada mutu.

Artinya, perangkat akreditasi yang dimaksudkan untuk menilai compliance atau ketaatan pada regulasi terbukti dalam jangka panjang tidak berdampak pada kualitas pendidikan.

Sementara itu, akreditasi yang dikembangkan untuk menilai hal-hal fundamental dalam pendidikan terbukti mendorong perbaikan kualitas institusi pendidikan. Di sinilah letak kesenjangan regulasi dengan kenyataan, pengambil kebijakan dengan problem nyata pendidikan.

Principal based accreditation inilah yang menginspirasi IASP 2020 untuk mengembangkan akreditasi sekolah/madrasah yang didasarkan performance (kinerja). Jadi, bukan sertifikat dan kualifikasi guru yang dinilai, tetapi seberapa baik kinerja guru dalam mengajar.

Juga bukan semata mengukur kelengkapan fasilitas belajar, tetapi lebih tertarik pada seberapa baik utilitas atau pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia untuk membangun suasana belajar di kelas.

Perubahan yang sedang terjadi dengan IASP 2020 adalah transformasi dari compliance menuju performance.

Kajian yang didasarkan data akreditasi secara nasional juga menemukan faktorfaktor yang secara empirik memberi sumbangan pada apa yang kita sebut sebagai kualitas sekolah.

Konsistensi antara inspirasi teoretis dan temuan empiris ini membawa BAN S/M untuk fokus pada kinerja sekolah dalam aspek guru (tenaga pendidik), manajerial kepala sekolah (pengelolaan), proses pembelajaran di kelas serta mutu lulusan.

Sementara aspek kurikulum, pembiayaan, penilaian pendidikan, sarana dan prasarana berada dalam ranah compliance. Ranah kepatuhan pada regulasi ini tidak perlu ditanyakan ulang saat visitasi asesor, tetapi cukup diambil dari data sekunder yang berlimpah di kementerian.

Di Kemendikbud disebut sebagai Data Pokok Pendidikan, di Kementerian Agama disebut sebagai Education Management Information System sehingga mengurangi pertanyaan dan menambah waktu untuk pertanyaan yang substantif.

Dibandingkan perangkat lama yang jumlahnya pada kisaran 120-130, perangkat baru nanti akan turun jauh menjadi sepertiganya. Dengan demikian, IASP 2020 melakukan lompatan untuk lebih melihat mutu secara substansial dengan tetap mendudukkan regulasi secara proporsional sebagai inspirasi, tanpa terjebak dalam kekakuannya.

Perdebatan antara akreditasi rezim regulasi dan kinerja bukan tanpa dinamika. Sebab sekian puluh tahun pendidikan kita dinilai overregulated (Surakhmad, 2009). Sehingga setiap diskusi tentang sebuah butir, selalu muncul pertanyaan apa dasar regulasinya.

Bukan ditanyakan dasar konseptualnya, apalagi dasar empiriknya yang nyatanya tidak mudah untuk didapat. Fakta ini menyadarkan, di internal Kemendikbud sendiri pemahaman empiris yang *robust* dan menyeluruh tentang apa itu sekolah bermutu masih sulit ditemukan.

Diskusi dan workshop panjang terkait dengan perubahan pola pikir dari compliance menuju performance menghasilkan jumlah pertanyaan akreditasi yang jauh lebih sedikit, tapi lebih holistik.

Pertanyaan akreditasi berubah menjadi pertanyaan terbuka yang membutuhkan proses triangulasi dari dokumen, observasi, dan wawancara. Tidak seperti sebelumnya yang cukup dengan mencentang A, B, C, dan D.

Perangkat baru dengan demikian memberi ruang bagi asesor untuk membangun penilaian yang didasarkan data kinerja nyata sekolah

Asesor yang sebagian besar telah berpengalaman menjadi guru, kepala sekolah, pengawas, dan dosen memiliki apa yang disebut mendikbud sebagai kemerdekaan untuk membangun penilaian atas apa yang kita sebut sebagai sekolah bermutu.

Tentu, pelatihan dan penyegaran bagi asesor dan pengelola sekolah penting untuk selalu dilakukan agar sepenuhnya siap dengan alam pikiran baru serta dunia yang terus berubah. ■